

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, terjadi perubahan terhadap sistem pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi demi mendorong pemberlakuan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik dan transparansi laporan keuangan. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas yang semakin besar, menimbulkan implikasi bagi pemerintah untuk memberikan informasi kepada public, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2018: 199). Laporan keuangan yang berkualitas merupakan wujud dari pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dari entitas pelaporan atau disebut dengan akuntabilitas publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan setiap periode. Sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan yang berkualitas akan disajikan secara terbuka dan jujur sehingga masyarakat dapat mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya dalam menjalankan peraturan yang berlaku. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah berkewajiban membuat laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban kepada publik serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntansi pemerintahan yang maju sebagai bagian dari akuntansi sektor publik, akan mendukung upaya pemerintah mewujudkan Good Public Governance

melalui pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2018: 221).

Kualitas dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan merupakan laporan keuangan. Pemerintah harus mampu mengelola dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar pemakai laporan keuangan dapat memahami isi dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang baik harus memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, pemerintah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Laudon & Laudon (2007) dalam Puspitawati (2021: 161) menyatakan bahwa implementasi dari sistem informasi akuntansi yang berkualitas akan menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas yang dapat digunakan oleh berbagai penggunanya. Hal ini sejalan dengan Sajadi, dkk (2008) dalam Puspitawati (2021:163) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa implementasi sistem informasi akuntansi pada perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan mempercepat proses transaksi perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses *input* yang diproses dengan baik dalam siklus akuntansi sampai dengan tahap menghasilkan *output*, sehingga dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses tersebut. Fadilah (2020) menyatakan adanya kepatuhan terhadap standar akuntansi dan sistem informasi akuntansi yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Susanto (2017) dalam Puspitawati (2021: 3) Sistem informasi akuntansi merupakan integrasi dari berbagai komponen fisik dan nonfisik yang saling berhubungan secara harmonis yang bertujuan untuk mengolah data keuangan agar efisien dan akurat menjadi

informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pengguna dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi dalam pemerintah daerah merupakan *software* atau aplikasi akuntansi untuk mengolah data keuangan daerah yang telah dibuat untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan data keuangan hingga menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi adalah alat untuk pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang volume transaksinya besar, kuantitasnya banyak dan kompleksitasnya bisa jadi semakin rumit setiap periodenya. Oleh karena itu pemanfaatan sistem informasi akuntansi perlu diterapkan dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Hal ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Rahmawati dkk (2018), Gafur dkk (2016), dan Nugroho & Setyowati (2019) yang membuktikan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk (2020) yang membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas telah ditemukan GAP pada hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa secara parsial variabel Pemanfaatan Sistem Informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dilakukan pertama kali di Pemerintahan Kota Jember dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Jember)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakanh yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dibuat adalah “Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember?”.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan dari sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.”

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman mengenai kegiatan penyajian laporan keuangan yang berkualitas di BPKAD Jember.

2. Bagi BPKAD Kabupaten Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam hal penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar nantinya bisa jauh lebih baik dan bisa menjadi contoh bagi SKPD lain.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi dan menyelesaikan skripsi yang sejenis bagi penulis di masa yang akan datang.